



Peran Tokoh Agama dalam Partisipasi Imunisasi di Indonesia: Studi Kepustakaan Sosiologi Kesehatan

Farhan Aditya Kusuma ^{a,1,*}, Salsabila Nur Azizah ^{b,2}, Rizky Ananda Pratama ^{c,3}

^a Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

^b Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

^c Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

¹ farhanadityakusuma@gmail.com; ² azizahnur56@gmail.com; ³ anandarizkyp78@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

The national immunization program continues to face social and religious barriers that influence vaccine acceptance rates in Indonesia. Communities with high levels of religiosity tend to consider the legitimacy of religious leaders and the halal status of vaccines before participating in immunization programs, creating challenges for the government in building public trust in health policies. This study aims to analyze the role of religious leaders in increasing public participation in immunization and to explain the relationship between religious legitimacy and vaccine acceptance within the context of public health policy in Indonesia. The study employed a qualitative method with a library research design through the analysis of scientific journals, health regulations, religious fatwas, and various academic documents relevant to the research topic. The findings indicate that religious leaders play a significant role in shaping public perceptions of vaccination through moral legitimacy, social communication, and the strengthening of trust in government health programs. The study also reveals that religious fatwas and collaboration between the government and religious institutions can reduce vaccine hesitancy and improve the effectiveness of health communication in religious communities. This study concludes that the integration of religious leaders into public health strategies constitutes an important factor in improving the success of national immunization programs in Indonesia.

Article History

Received 2026-04-11

Revised 2026-04-28

Accepted 2026-05-07

Published 2026-06-23

Keywords

Religious Leaders;
Immunization
Participation;
Vaccine Hesitancy;
Health Sociology;
Library Research

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Program imunisasi merupakan instrumen utama dalam pencegahan penyakit menular dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan vaksinasi melalui berbagai regulasi kesehatan nasional, termasuk selama pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia masih menghadapi hambatan sosial dan kultural yang kuat, terutama pada masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi. Amelia et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 memunculkan perdebatan mengenai relasi antara hak individu dan kewajiban warga negara dalam menjaga kesehatan publik. Pada saat yang sama, Jacovetty et al. (2025) menemukan bahwa keraguan vaksin berbasis agama memiliki hubungan signifikan dengan rendahnya cakupan imunisasi lengkap anak di Aceh. Chait et al. (2024) juga mengidentifikasi bahwa faktor komunitas keagamaan dan kepercayaan spiritual memengaruhi keputusan masyarakat dalam menerima atau menolak vaksin. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada aspek medis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan otoritas keagamaan di tingkat komunitas.

Isu keterlibatan tokoh agama dalam vaksinasi menjadi semakin penting karena masyarakat Indonesia masih menempatkan pemuka agama sebagai sumber rujukan moral dan sosial. Aula (2020) menjelaskan bahwa tokoh agama memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik melalui media sosial, ceramah, dan aktivitas keagamaan. Muchammadun et al. (2021) juga menunjukkan bahwa tokoh agama berperan aktif dalam membantu pemerintah menangani penyebaran Covid-19 melalui edukasi kesehatan dan penguatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dalam konteks vaksinasi, peran tersebut semakin strategis ketika muncul keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan bahwa imunisasi merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan mencegah bahaya yang lebih besar. Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa sehingga masyarakat Muslim tetap dapat mengikuti program vaksinasi selama Ramadan. Dukungan normatif tersebut menunjukkan bahwa institusi keagamaan memiliki posisi penting dalam memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas vaccine hesitancy dan komunikasi kesehatan, sebagian besar penelitian masih memisahkan faktor kesehatan masyarakat dari dinamika otoritas keagamaan lokal. Hanifah et al. (2021) mengidentifikasi berbagai determinan keraguan vaksin di Indonesia, tetapi kajian tersebut belum menjelaskan secara mendalam bagaimana tokoh agama memengaruhi keputusan kolektif masyarakat dalam konteks sosial yang berbeda. Hidayana et al. (2022) menggunakan Health Belief Model untuk menjelaskan niat vaksinasi masyarakat Jakarta, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada persepsi individu dibandingkan pengaruh struktur sosial keagamaan. Di sisi lain, Sheikhi et al. (2025) menyimpulkan bahwa pemimpin agama dapat meningkatkan penerimaan vaksin, tetapi kajian tersebut bersifat global dan belum menggambarkan karakteristik masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki struktur otoritas keagamaan desentralistik. Penelitian sebelumnya juga belum banyak membahas bagaimana tokoh agama memediasi hubungan antara regulasi pemerintah, fatwa keagamaan, dan resistensi masyarakat terhadap vaksin tertentu. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih integratif mengenai posisi tokoh agama dalam akselerasi partisipasi imunisasi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis karena mengkaji hubungan antara otoritas keagamaan, perilaku kesehatan masyarakat, dan implementasi kebijakan imunisasi nasional. Kajian ini memanfaatkan pendekatan sosiologis dan kesehatan masyarakat untuk memahami bagaimana tokoh agama membentuk persepsi risiko, legitimasi vaksin, dan kepatuhan sosial dalam program imunisasi. Penelitian ini juga menempatkan fatwa keagamaan dan regulasi kesehatan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap vaksinasi. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana institusi keagamaan dapat membantu pemerintah mengatasi hambatan teologis dan sosial dalam pelaksanaan imunisasi di wilayah dengan tingkat religiusitas tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi imunisasi masyarakat serta menjelaskan hubungan antara legitimasi keagamaan dan penerimaan vaksin dalam konteks kebijakan kesehatan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Penelitian memusatkan analisis pada berbagai literatur akademik, regulasi kesehatan, fatwa keagamaan, dan hasil penelitian empiris yang membahas hubungan antara

tokoh agama dan partisipasi imunisasi di Indonesia. Desain penelitian dipilih karena kajian mengenai vaccine hesitancy berbasis agama membutuhkan penelusuran konseptual dan interpretatif terhadap dinamika sosial, budaya, serta kebijakan kesehatan masyarakat. Penelitian kepustakaan juga memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap relasi antara otoritas keagamaan, perilaku kesehatan, dan regulasi negara dalam konteks imunisasi nasional. Pendekatan tersebut relevan untuk mengidentifikasi pola argumentasi, bentuk resistensi sosial, dan strategi integrasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas keagamaan.

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi kesehatan dengan dukungan perspektif kesehatan masyarakat dan fiqh medis. Pendekatan sosiologi kesehatan membantu penelitian menjelaskan bagaimana struktur sosial, otoritas keagamaan, dan kepercayaan komunitas memengaruhi keputusan masyarakat dalam menerima vaksinasi. Perspektif kesehatan masyarakat digunakan untuk memahami hubungan antara kebijakan imunisasi, tingkat partisipasi masyarakat, dan hambatan implementasi program vaksinasi nasional. Sementara itu, pendekatan fiqh medis digunakan untuk menelaah legitimasi teologis vaksinasi melalui konsep maqasid al-shariah, darurat, serta perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam (Al Hakim et al., 2026; Hidayana et al., 2022; Sheikhi et al., 2025).

Objek penelitian berfokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi imunisasi masyarakat di Indonesia. Penelitian menelaah pengaruh legitimasi keagamaan terhadap penerimaan vaksin serta hubungan antara otoritas spiritual dan kebijakan kesehatan publik. Sumber data penelitian berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi pemerintah, fatwa keagamaan, serta buku yang relevan dengan tema vaksinasi dan kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan artikel empiris mengenai vaccine hesitancy, komunikasi kesehatan, dan pengaruh tokoh agama terhadap perilaku masyarakat, seperti penelitian Jacovetty et al. (2025), Chait et al. (2024), dan Muchammadun et al. (2021). Selain itu, penelitian juga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 (Kementerian Kesehatan RI, 2020), serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 dan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 sebagai sumber data normatif yang mendukung analisis kebijakan kesehatan dan legitimasi keagamaan.

Penelitian mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi terhadap seluruh sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat informasi penting dari setiap referensi yang berkaitan dengan vaksinasi, keraguan vaksin, komunikasi kesehatan, dan otoritas keagamaan. Penelitian memprioritaskan sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan konteks Indonesia dan masyarakat Muslim sebagai fokus utama pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti hambatan teologis, legitimasi fatwa, peran tokoh agama, dan implementasi kebijakan vaksinasi. Teknik dokumentasi dipilih karena penelitian tidak menggunakan observasi lapangan maupun wawancara langsung, melainkan mengandalkan analisis mendalam terhadap data sekunder yang telah dipublikasikan sebelumnya (Aula, 2020; Hanifah et al., 2021).

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian terlebih dahulu menyeleksi data yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian mengenai peran tokoh agama dalam program imunisasi. Setelah proses reduksi selesai, penelitian menyusun data berdasarkan pola hubungan antara otoritas keagamaan, perilaku kesehatan masyarakat, dan regulasi vaksinasi nasional. Analisis kemudian menginterpretasikan keterkaitan antarvariabel menggunakan perspektif Health Belief Model dan Social-Ecological Model untuk menjelaskan pengaruh faktor sosial dan

religius terhadap penerimaan vaksin (Chait et al., 2024; Hidayana et al., 2022). Tahap akhir penelitian merumuskan kesimpulan mengenai pentingnya integrasi pendekatan kesehatan masyarakat dan legitimasi keagamaan dalam memperkuat keberhasilan program imunisasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tokoh Agama terhadap Penerimaan Vaksinasi Masyarakat

Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap masyarakat dalam menerima maupun menolak vaksinasi. Masyarakat Indonesia dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menjadikan pemuka agama sebagai sumber legitimasi moral dalam menentukan keputusan kesehatan keluarga. Kondisi tersebut terlihat jelas pada masyarakat Muslim di wilayah konservatif seperti Aceh yang masih mempertimbangkan aspek halal, keamanan, dan kepercayaan terhadap produsen vaksin sebelum mengikuti program imunisasi. Jacovetty et al. (2025) menemukan bahwa keraguan vaksin berbasis agama berhubungan langsung dengan rendahnya cakupan imunisasi lengkap pada anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan manfaat medis vaksin, tetapi juga mempertimbangkan validasi spiritual dari tokoh agama yang mereka percayai.

Pengaruh sosial tokoh agama semakin kuat karena masyarakat sering kali memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada pemuka agama dibandingkan kepada institusi pemerintah. Chait et al. (2024) menjelaskan bahwa faktor komunitas keagamaan dan keyakinan spiritual memengaruhi perilaku vaksinasi pada masyarakat negara berkembang dengan religiusitas tinggi. Tokoh agama mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap vaksin melalui ceramah, fatwa, dan komunikasi interpersonal di lingkungan sosial keagamaan. Ketika pemuka agama mendukung vaksinasi, masyarakat lebih mudah menerima informasi kesehatan dan menurunkan tingkat kecemasan terhadap isu efek samping maupun isu kehalalan vaksin. Sebaliknya, ketika tokoh agama menunjukkan keraguan terhadap vaksin tertentu, masyarakat cenderung mengikuti sikap tersebut secara kolektif.

Peran tokoh agama juga terlihat dalam proses edukasi masyarakat selama pandemi Covid-19. Muchammadun et al. (2021) menjelaskan bahwa pemuka agama membantu pemerintah menyampaikan pesan kesehatan melalui kegiatan dakwah dan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Tokoh agama menggunakan otoritas moral mereka untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Simon et al. (2021) juga menemukan bahwa partisipasi tokoh agama membantu meningkatkan keberhasilan program vaksinasi pemerintah karena masyarakat merasa lebih aman ketika memperoleh dukungan langsung dari pemimpin spiritual mereka. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki tokoh agama di tingkat komunitas.

Faktor Keagamaan sebagai Penyebab Vaccine Hesitancy

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keagamaan menjadi salah satu penyebab utama munculnya vaccine hesitancy di Indonesia. Sebagian masyarakat masih meragukan kandungan bahan vaksin dan mengaitkannya dengan persoalan halal-haram dalam hukum Islam. Penolakan terhadap vaksin tidak selalu muncul karena masyarakat menolak ilmu kesehatan, tetapi lebih sering muncul karena masyarakat meragukan legitimasi teologis dari produk vaksin tertentu. Pida (2020) menemukan bahwa ibu yang memiliki bayi di Aceh Besar menunjukkan

keraguan terhadap imunisasi karena kekhawatiran mengenai kandungan vaksin dan dampaknya terhadap keyakinan agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor teologis memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku kesehatan masyarakat.

Keraguan masyarakat terhadap vaksin semakin meningkat ketika informasi yang beredar di media sosial tidak disertai klarifikasi ilmiah dan keagamaan yang memadai. Aula (2020) menjelaskan bahwa media online menjadi ruang penyebaran berbagai opini keagamaan selama pandemi Covid-19, termasuk narasi yang mempertanyakan keamanan vaksin. Informasi yang tidak terverifikasi kemudian membentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi pemerintah. Pada kondisi tersebut, masyarakat lebih mudah menerima pendapat tokoh agama lokal dibandingkan penjelasan formal dari institusi kesehatan negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa komunikasi kesehatan yang mengabaikan sensitivitas agama akan menghadapi resistensi sosial yang lebih besar.

Faktor keagamaan juga berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai takdir dan perlindungan spiritual. Chait et al. (2024) menemukan bahwa sebagian masyarakat meyakini bahwa perlindungan spiritual lebih penting dibandingkan intervensi medis modern. Keyakinan tersebut menyebabkan masyarakat menempatkan vaksinasi sebagai pilihan sekunder dibandingkan pendekatan religius tradisional. Dalam konteks tersebut, tokoh agama memegang posisi penting karena mereka dapat menghubungkan ajaran agama dengan kepentingan kesehatan publik. Ketika pemuka agama menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga jiwa, masyarakat cenderung lebih terbuka menerima program imunisasi pemerintah.

Peran Fatwa Keagamaan dalam Legitimasi Program Imunisasi

Kajian menunjukkan bahwa fatwa keagamaan memiliki fungsi strategis dalam memperkuat legitimasi program vaksinasi nasional. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan bahwa imunisasi merupakan upaya preventif yang dibenarkan dalam Islam untuk mencegah penyakit dan menjaga keselamatan jiwa. Fatwa tersebut memberikan dasar normatif bahwa vaksinasi bukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan adanya legitimasi tersebut, pemerintah memperoleh dukungan moral untuk menjalankan program imunisasi di tengah masyarakat Muslim. Dukungan tersebut penting karena masyarakat Indonesia masih menempatkan fatwa sebagai rujukan etis dalam kehidupan sosial dan kesehatan.

Fatwa keagamaan juga membantu mengurangi konflik sosial yang muncul selama pandemi Covid-19. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa. Fatwa tersebut menjawab keraguan masyarakat Muslim yang khawatir vaksinasi akan mengganggu pelaksanaan ibadah Ramadan. Setelah fatwa diterbitkan, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melanjutkan program vaksinasi selama bulan puasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi agama memiliki dampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan kesehatan publik.

Meskipun demikian, fatwa nasional tidak selalu langsung diterima oleh seluruh tokoh agama lokal. Beberapa pemuka agama tetap menunjukkan sikap kritis terhadap jenis vaksin tertentu karena mempertimbangkan kondisi darurat, kandungan bahan, dan tingkat kebutuhan masyarakat. Jacovetty et al. (2025) menunjukkan bahwa keraguan vaksin berbasis agama tetap muncul meskipun otoritas nasional telah memberikan legitimasi hukum terhadap vaksinasi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa struktur otoritas keagamaan di Indonesia bersifat desentralistik dan dipengaruhi oleh kharisma tokoh lokal. Akibatnya, keberhasilan vaksinasi tidak cukup bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga membutuhkan pendekatan dialogis dengan pemimpin agama di tingkat komunitas.

Hubungan Otoritas Sosial dan Komunikasi Kesehatan

Hasil kajian memperlihatkan bahwa komunikasi kesehatan yang melibatkan tokoh agama lebih efektif dibandingkan pendekatan administratif yang bersifat koersif. Hidayana et al. (2022) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap risiko penyakit dan manfaat vaksin dipengaruhi oleh sumber informasi yang dianggap kredibel. Dalam masyarakat religius, tokoh agama memiliki posisi sebagai sumber informasi terpercaya yang mampu memengaruhi perilaku kolektif. Ketika pemerintah menyampaikan kebijakan vaksinasi tanpa melibatkan pemimpin agama, masyarakat lebih mudah membangun kecurigaan terhadap tujuan program tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi kesehatan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kepercayaan sosial.

Hubungan antara otoritas sosial dan komunikasi kesehatan terlihat pada pola penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. Masyarakat yang memperoleh dukungan dari pemuka agama cenderung menunjukkan tingkat penerimaan vaksin yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya menerima informasi formal dari pemerintah. Muchammadun et al. (2021) menunjukkan bahwa tokoh agama membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara negara dan masyarakat melalui pendekatan persuasif berbasis nilai moral dan keagamaan (Saragih et al., 2023). Pendekatan tersebut menciptakan rasa aman karena masyarakat merasa bahwa vaksinasi tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Dalam konteks ini, tokoh agama berfungsi sebagai mediator sosial antara kebijakan negara dan budaya masyarakat lokal.

Efektivitas komunikasi berbasis agama juga terlihat pada kegiatan edukasi yang dilakukan di lingkungan pesantren, masjid, dan komunitas keagamaan. Mawarti et al. (2022) menjelaskan bahwa kegiatan edukasi vaksinasi di lingkungan pesantren mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya vaksin Covid-19. Lingkungan keagamaan menciptakan ruang komunikasi yang lebih dekat dan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan kampanye formal pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang sosial keagamaan dapat berfungsi sebagai media strategis dalam penyebaran informasi kesehatan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas kolaborasi dengan lembaga keagamaan dalam setiap program imunisasi nasional.

Hambatan Sosial dan Tantangan Kebijakan Vaksinasi

Kajian menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi hambatan sosial dalam pelaksanaan vaksinasi nasional, terutama pada wilayah dengan tingkat konservatisme agama yang tinggi. Pemerintah sering menggunakan pendekatan administratif dan regulatif dalam meningkatkan cakupan vaksinasi, tetapi pendekatan tersebut tidak selalu berhasil membangun penerimaan masyarakat. Amelia et al. (2021) menjelaskan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 menimbulkan perdebatan mengenai batas antara hak individu dan kewajiban warga negara. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan wajib vaksin tanpa komunikasi sosial yang memadai, sebagian masyarakat memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk tekanan negara terhadap kebebasan individu. Kondisi tersebut memperbesar resistensi sosial terhadap program kesehatan publik.

Hambatan sosial juga muncul karena rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Yufika et al. (2020) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman rendah mengenai vaksin lebih mudah mempercayai informasi keliru mengenai efek samping dan konspirasi vaksinasi. Informasi yang tidak terverifikasi kemudian menyebar cepat melalui media sosial dan memperkuat ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Dalam situasi tersebut, tokoh agama memiliki peran penting untuk meluruskan informasi dan membangun kesadaran kolektif

mengenai pentingnya imunisasi. Namun, pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi jaringan sosial keagamaan dalam strategi komunikasi kesehatan nasional.

Tantangan kebijakan juga berkaitan dengan kesenjangan antara regulasi nasional dan realitas sosial lokal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program kesehatan nasional, termasuk imunisasi. Akan tetapi, implementasi kebijakan di tingkat daerah tetap dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada wilayah dengan pengaruh tokoh agama yang kuat, masyarakat cenderung lebih mematuhi arahan pemuka agama dibandingkan instruksi administratif pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan model kebijakan yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap karakter sosial masyarakat lokal.

Integrasi Tokoh Agama dalam Strategi Kesehatan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tokoh agama dalam strategi kesehatan publik dapat meningkatkan efektivitas program imunisasi nasional. Tokoh agama memiliki kemampuan membangun kepercayaan sosial, mengurangi kecemasan masyarakat, dan memperkuat legitimasi vaksinasi melalui pendekatan moral dan spiritual. Ladhania et al. (2025) menunjukkan bahwa konferensi keagamaan dan klinik vaksin bergerak berbasis komunitas mampu meningkatkan penerimaan vaksin anak di Aceh. Program tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan kesehatan yang melibatkan institusi keagamaan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan birokratis yang bersifat formal. Integrasi tersebut juga membantu pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit menerima program imunisasi.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan tokoh agama memungkinkan terbentuknya model komunikasi kesehatan yang lebih adaptif. Sheikhi et al. (2025) menjelaskan bahwa pemimpin agama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin melalui dukungan moral dan penyampaian informasi yang sesuai dengan nilai budaya lokal. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan kesehatan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu membangun solidaritas komunitas dalam menghadapi krisis kesehatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kemitraan jangka panjang dengan institusi keagamaan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan.

Integrasi tokoh agama dalam strategi kesehatan publik juga mendukung pendekatan preventif dalam pembangunan kesehatan nasional. Arifianto (2019) menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang benar mengenai vaksin dan imunisasi agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi anti-vaksin. Tokoh agama dapat membantu menyampaikan pemahaman tersebut melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Ketika masyarakat memahami bahwa vaksinasi sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa dalam Islam, tingkat penerimaan terhadap imunisasi cenderung meningkat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sinergi antara ilmu kesehatan dan legitimasi agama menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi imunisasi masyarakat di Indonesia. Tokoh agama memengaruhi penerimaan vaksin melalui legitimasi moral, komunikasi sosial, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan publik. Masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi

cenderung menjadikan pemuka agama sebagai rujukan utama dalam menentukan keputusan kesehatan keluarga, terutama terkait isu kehalalan dan keamanan vaksin. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan kesehatan dan regulasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negara membangun kolaborasi dengan institusi keagamaan. Dengan demikian, hubungan antara legitimasi keagamaan dan kebijakan kesehatan publik menjadi faktor strategis dalam memperkuat keberhasilan vaksinasi nasional.

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam pengembangan kajian sosiologi kesehatan dan komunikasi kesehatan berbasis komunitas keagamaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perilaku vaksinasi masyarakat tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan medis atau administratif, tetapi juga harus dipahami melalui struktur sosial, budaya, dan religius yang berkembang di masyarakat. Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan tokoh agama dalam penyusunan strategi komunikasi kesehatan nasional. Pemerintah perlu memperluas kerja sama dengan lembaga keagamaan agar program imunisasi lebih mudah diterima oleh masyarakat di wilayah dengan tingkat konservatisme agama yang tinggi. Pendekatan kolaboratif tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung. Penelitian hanya mengandalkan data sekunder dari jurnal ilmiah, regulasi, fatwa keagamaan, dan dokumen akademik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian belum dapat menggambarkan secara empiris dinamika komunikasi antara tokoh agama dan masyarakat di tingkat lokal secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian belum membandingkan secara spesifik perbedaan pengaruh tokoh agama pada komunitas perkotaan dan pedesaan dalam pelaksanaan program imunisasi. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan lapangan dengan wawancara, observasi, atau survei terhadap masyarakat dan pemuka agama.

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas model kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama dalam program imunisasi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji pengaruh media sosial dan komunikasi digital keagamaan terhadap pembentukan opini masyarakat mengenai vaksinasi. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu melibatkan tokoh agama sejak tahap perencanaan program kesehatan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang selaras dengan nilai sosial dan keyakinan agama mereka. Institusi kesehatan juga perlu memperkuat edukasi publik mengenai vaksin melalui pendekatan budaya dan keagamaan yang lebih kontekstual. Dengan strategi tersebut, program imunisasi nasional dapat berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih menunjukkan keraguan terhadap vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, M. B., Muzakki, M. F., Shafira, N., Litha, S. F., & Zali, M. (2026). Perspektif fiqh terhadap kehalalan vaksin dan peran tokoh agama dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL). *JIKES Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(2), 257–266. <https://doi.org/10.71456/jik.v4i2.1623>

- Amelia, N., Rahmah, S., & Harahap, S. N. (2021). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23–41.
- Arifianto. (2019). *Yakin dengan vaksin dan imunisasi? Kata Depan*.
- Aula, S. K. N. (2020). Peran tokoh agama dalam memutus rantai pandemi COVID-19 di media online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Chait, R. M., Nastiti, A., Chintana, D. A., Sari, P. N., Marasabessy, N., Firdaus, M. I., Dirgawati, M., Agustian, D., West, H., Ariesyady, H. D., & Shibata, T. (2024). Using the social–ecological model to assess vaccine hesitancy and refusal in a highly religious lower–middle-income country. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(10), 1335. <https://doi.org/10.3390/ijerph21101335>
- Hanifah, N., et al. (2021). Determinants of vaccine hesitancy in Indonesia: A scoping review. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 25(1), 3–11. <https://doi.org/10.7454/hubs.asia.3140920>
- Hidayana, I., Amir, S., Pelupessy, D. C., & Rahvenia, Z. (2022). Using a health belief model to assess COVID-19 vaccine intention and hesitancy in Jakarta, Indonesia. *PLOS Global Public Health*, 2(10), e0000934. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000934>
- Jacovetty, J., Harapan, H., Sofyan, H., Kamil, Q., Ichsan, I., Eriani, K., Kaplan, L., Rayhan, M. A., & Harapan, H. (2025). Associations between parental vaccine hesitancy, religion-based vaccine hesitancy, and childhood full vaccination in a cross-sectional study in Aceh, Indonesia, 2023. *Vaccine*, 56, 127154. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127154>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi*.
- Ladhania, R., Ichsan, I., Koumpias, A. M., Yufika, A., Indah, R., Liansyah, T. M., Wagner, A. L., & Harapan, H. (2025). Improving uptake of pediatric vaccines through religious conferences and mobile vaccine clinics in Aceh, Indonesia (TABRIE): Study protocol for a stepped wedge cluster randomized controlled trial. *Trials*, 26(1), 528. <https://doi.org/10.1186/s13063-025-09170-5>
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang imunisasi*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa*.
- Mawarti, H., Yani, A. L., Nasrudin, N., Khotimah, K., Mukhoirotn, M., & Suyati, S. (2022). Pelaksanaan vaksinasi dan edukasi COVID-19 di SMU DU 1 Ponpes Darul Ulum Jombang. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(2), 229–236. <https://doi.org/10.37287/jpm.v4i2.1015>
- Muchammadun, M., Rachmad, S. H., Handiyatmo, D., Tantriana, A., Rumanitha, E., & Amrulloh, Z. (2021). Peran tokoh agama dalam menangani penyebaran COVID-19. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(1), 87–96. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.10378>
- Pida, N. (2020). Determinan vaccine hesitancy pada ibu yang memiliki bayi di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Aceh Medika*, 4(2), 47–64.
- Saragih, N., Mansur, S., Pambayun, E. L., & Topikurohman. (2023). Organizational ethnography analysis: Participation of Islamic religious leaders in handling COVID-19 through integrative communication. *Journal of Intercultural Communication*, 23(4), 163. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i4.163>

-
- Sheikhi, R. A., Heidari, M., & Doosti, P. (2025). The role of religious leaders in the acceptance of COVID-19 vaccinations: A systematic review. *BMC Public Health*, 25(1), 2683. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23947-y>
- Simon, S., Tampenawas, A. R., Santoso, J., Nainupu, A. M. Y., Angkouw, S. R., & Poluan, A. (2021). Participation of religious leaders in helping the success of the government's COVID-19 vaccination program. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5(2), 234–245. <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i2.405>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. (2023).
- Yufika, A., et al. (2020). Vaccination in Indonesia: A cross-sectional study in Indonesia. *Vaccine*, 38(11), 2592–2599. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.01.072>